

**KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI  
DALAM ERA NONTRANSISIONAL:  
IMPLEMENTASI DI KOREA SELATAN DAN KANADA  
(*Truth and Reconciliation Commission in Non-transitional Era:  
Implementation in South Korea and Canada*)**

**Anggarani Utami Dewi; Mustafa Fakhri  
Magister Hukum Universitas Indonesia  
[anggarani.kemenkumham@gmail.com](mailto:anggarani.kemenkumham@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*This article aims to explain the practice of Truth and Reconciliation Commission (TRC) in non-transitional era. The TRC in non-transitional era was formed by democratic country to reveal the truth of gross human rights violations that occurred decades ago. This research uses comparative method that compares the practice of TRC in South Korea (Commission on Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation/TRCK) and Canada (Truth and Reconciliation Commission of Canada/TRCC). The results of the study indicate that the TRCK and TRCC were formed as an effort by the state to improve previous efforts in dealing with gross human rights violations; the number of staff members had a more significant impact on the success of the TRC than the number of commissioners; the norms governing the protection, prohibition, and sanctions for commissioners and staff, witnesses, the persons named in the testimony and for individual and community in general; TRCK and TRCC gathered facts within two years; and the reconciliation process was carried out by the commission through the rehabilitation of reputations and holding memorial services. This article recommends that the practice of TRC in South Korea and Canada can be adopted in the preparation of policies for the establishment of TRCs in Indonesia.*

**Keywords:** *truth commission; reconciliation; gross human rights violations.*

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan praktik Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) dalam era nontransisional. KKR dalam era nontransisional dibentuk oleh negara demokrasi untuk mengungkapkan kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian perbandingan yang membandingkan praktik KKR di Korea Selatan (*Commission on Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation/TRCK*) dan Kanada (*Truth and Reconciliation Commission of Canada/TRCC*). Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal, yakni bahwa TRCK dan TRCC dibentuk sebagai upaya negara menyempurnakan berbagai upaya terdahulu dalam menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu; jumlah keanggotaan staf lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap kesuksesan KKR dibandingkan jumlah komisioner; adanya norma yang mengatur mengenai perlindungan, larangan, dan sanksi bagi komisioner dan staf, pemberi kesaksian, orang-orang yang tersebut namanya dalam kesaksian serta masyarakat secara umum; TRCK dan TRCC mengumpulkan fakta dalam waktu dua tahun; dan proses rekonsiliasi dilakukan oleh komisi melalui rehabilitasi nama baik dan melakukan berbagai upacara peringatan. Artikel ini merekomendasikan agar praktik KKR di Korea Selatan dan Kanada dapat diadopsi dalam penyiapan kebijakan pembentukan KKR di Indonesia.

**Kata Kunci:** *komisi kebenaran; rekonsiliasi; pelanggaran HAM berat.*

## PENDAHULUAN

Selama hampir lima puluh tahun, komisi kebenaran dan rekonsiliasi (selanjutnya disebut dengan “KKR”) telah berkembang dan tidak hanya digunakan oleh negara untuk menyelidiki peristiwa pelanggaran HAM yang berat akibat pemerintahan yang otoriter ataupun untuk mengakhiri konflik. Komisi kebenaran juga digunakan untuk menyelidiki peristiwa pelanggaran HAM yang berat dalam periode yang panjang oleh negara demokrasi dan tidak dalam masa transisi suatu rezim pemerintahan.<sup>1</sup> Korea Selatan dan Kanada adalah negara yang membentuk komisi kebenaran untuk menyelidiki peristiwa dalam periode yang panjang dan bukan dalam masa transisi rezim pemerintahan yang otoriter. Korea Selatan membentuk *Commission on Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation* (selanjutnya disebut “TRCK”) pada tahun 2005 untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat yang terjadi sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1910 hingga berakhirnya rezim diktator pada tahun 1993, sedangkan Kanada membentuk *Truth and Reconciliation Commission of Canada* (selanjutnya disebut “TRCC”) untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat yang terjadi akibat adanya kebijakan sekolah pemukiman (*residential school*) khusus untuk masyarakat suku asli Kanada sejak tahun 1869 hingga berakhirnya operasional sekolah pemukiman pada tahun 1998, yakni pada saat berlakunya *Statement of Reconciliation* tanggal 7 Januari 1998.<sup>2</sup>

Komisi kebenaran merupakan salah satu cara suatu negara dalam menghadapi masa lalu yang dialaminya (*dealing with the past*),<sup>3</sup> dan dapat mengetahui pola-pola kekerasan yang terjadi.<sup>4</sup>

Menurut Adam Kochanski, keadilan transisi merupakan cara suatu negara untuk mengatasi konflik akibat pelanggaran HAM yang berskala besar atau sistematis karena tidak mempunya sistem peradilan yang normal.<sup>5</sup> Hal ini sebagaimana telah dijelaskan Ruti G. Teitel, dimana keadilan transisi adalah cara negara yang tidak melanggar hukum untuk berdamai atas pelanggaran hukum yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu bagian dari keadilan transisi, maka komisi kebenaran tidak ditujukan untuk menuliskan narasi dari masing-masing individu. Komisi kebenaran dibentuk untuk dapat memaparkan narasi secara umum dan kebenaran komunal yang diperoleh dari kesaksian setiap individu.<sup>7</sup> Oleh karena itu, komisi kebenaran harus merekam kesaksian dari seluruh pihak, baik korban maupun mereka yang dianggap bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Menurut Adam Kochanski, para ahli sepakat bahwa secara umum komisi kebenaran adalah lembaga yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atau mencari fakta.<sup>9</sup> Para ahli seperti Mark Freeman,<sup>10</sup> Onur Bakiner,<sup>11</sup> dan Jeremy Sarkin<sup>12</sup> menyebutkan bahwa komisi kebenaran

---

*Review* 21 (2020): 114.

1 Onur Bakiner, *Truth Commissions: Memory, Power, and Legitimacy* (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2016), 24.  
2 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada* (Winnipeg, 2015), 3.  
3 Jonathan Sisson, “A Conceptual Framework for Dealing with the Past,” *Politorbis*, no. 50–3 (2010): 13.  
4 Adam Kochanski, “Mandating Truth : Patterns and Trends in Truth Commission Design,” *Human Rights*

5 Adam Kochanski, “Framing, Truth-Telling, and the Limits of Local Transitional Justice,” *Review of International Studies* 1 (2021): 1.  
6 Ruti G. Teitel, *Transitional Justice* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 3.  
7 Meryll Lawry-White, “The Reparative Effect of Truth Seeking in Transitional Justice,” *International and Comparative Law Quarterly* 64, no. 1 (2015): 143.  
8 Jr Everett L. Worthington and Jamie D. Aten, “Forgiveness and Reconciliation in Social Reconstruction After Trauma,” in *Trauma Rehabilitation After War and Conflict*, ed. Erin Martz, 1st ed. (New York: Springer, 2010), 67.  
9 Kochanski, “Mandating Truth : Patterns and Trends in Truth Commission Design,” 121.  
10 Mark Freeman, *Truth Commissions and Procedural Fairness*, Pertama. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 18.  
11 Bakiner, *Truth Commissions: Memory, Power, and Legitimacy*, 24.  
12 Jeremy Julian Sarkin, “Redesigning the Definition a Truth Commission , but Also Designing a Forward-Looking Non-Preceptive Definition to Make Them Potentially More Successful,” *Human Rights Review* 19 (2018): 355.

harus diberi kewenangan atau disahkan atau dibentuk oleh negara, sehingga lembaga inkuiri yang menyelidiki peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak dapat dikategorikan sebagai komisi kebenaran. Priscilla Hayner sebelumnya tidak mensyaratkan bahwa komisi kebenaran harus diberi kewenangan atau dibentuk oleh negara, namun Hayner menambahkan ciri ini dalam definisinya pada tahun 2011.<sup>13</sup>

Onur Bakiner mengklasifikasikan tiga generasi komisi kebenaran, yakni komisi kebenaran generasi transisional pertama, komisi kebenaran generasi transisional kedua, dan komisi kebenaran generasi nontransisional. Komisi kebenaran generasi transisional pertama dibentuk negara untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat sebagai bagian dari transisi rezim otoriter ke rezim yang lebih demokrasi. Komisi kebenaran generasi transisional kedua dibentuk untuk menghentikan perang sipil atau konflik bersenjata, dan mulai adanya campur tangan pihak internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembentukan komisi. Komisi kebenaran generasi nontransisional dibentuk oleh negara demokrasi atau untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat yang telah selesai lebih dari tiga tahun yang lalu. Era nontransisional juga ditunjukkan pada keadaan demokrasi politik yang bebas dan/atau pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih sukses.<sup>14</sup>

Apabila non transisi adalah bentuk negatif dari 'transisi', maka merujuk Satya Arinanto yang menyatakan bahwa ruang lingkup masa transisi adalah sejak berakhirnya suatu rezim pemerintahan hingga terbentuknya pemerintahan yang demokrasi dan tidak terkekang.<sup>15</sup> Stephen Winter menyebutkan bahwa negara demokrasi yang menggunakan keadilan transisional dalam

menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya maka termasuk dalam negara non transisi.<sup>16</sup> Selanjutnya, menurut Kelebogile Zvobgo, terdapat perbedaan komisi kebenaran yang dibentuk dalam era transisi dengan komisi kebenaran yang dibentuk dalam era non transisional, terutama dalam hal tujuan dan metode komisi kebenaran, dan setidaknya terdapat 36 komisi kebenaran yang dibentuk pada era non transisional hingga tahun 2018.<sup>17</sup> Istilah lain juga disebutkan oleh Cath Collins yakni "komisi pasca transisional (*post-transitional commission*)" untuk menyebut komisi kebenaran yang dibentuk dalam konteks nontransisional.<sup>18</sup>

Korea Selatan telah membentuk lebih dari sepuluh komisi kebenaran, beberapa diantaranya adalah *The Jeju Commission (2000)*, *The Presidential Truth Commission on Suspicious Deaths (2000 – 2004)*, dan *Truth and Reconciliation Commission, Republic of Korea/ TRCK (2005 – 2010)*.<sup>19</sup> Dalam artikel, komisi kebenaran di Korea Selatan yang akan menjadi obyek perbandingan adalah TRCK yang dibentuk tahun 2005. Ruang lingkup penyelidikan TRCK adalah peristiwa yang terjadi pada saat adanya gerakan anti pendudukan Jepang pada tahun 1910 hingga kemerdekaan pada tahun 1945, peristiwa pembantaian yang terjadi sejak 15 Agustus 1945 hingga terjadinya Perang Korea 1952, peristiwa kematian, penghilangan orang, dan pelanggaran HAM berat lain berkaitan dengan politik termasuk aksi-aksi terorisme yang terjadi sejak 15 Agustus 1945 hingga berakhirnya rezim otoriter, serta

13 Priscilla B. Hayner, *Unspeakable Truths: Transitional Justice and The Challenge of Truth Commissions*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2011), 12.

14 Bakiner, *Truth Commissions: Memory, Power, and Legitimacy*, 34–37.

15 Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, 5th ed. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2003), 42.

16 Stephen Winter, *Transitional Justice in Established Democracies* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014), 6.

17 Kelebogile Zvobgo, "Demanding Truth: The Global Transitional Justice Network and the Creation of Truth Commissions," *International Studies Quarterly* 64, no. 3 (2020): 613.

18 Eric Wiebelhaus-Brahm, "Truth Commissions in Non-Transitional Contexts: Implications for Their Impact and Legacy," *The Global Impact and Legacy of Truth Commissions* (2019): 254.

19 Hun Joon Kim, "Trial and Error in Transitional Justice: Learning from South Korea's Truth Commissions," *Buffalo Human Rights Law Review* 19, no. 1 (2013): 125.

peristiwa lain yang berpengaruh dalam sejarah.<sup>20</sup> Dengan ruang lingkup penyelidikan yang panjang, luas dan berakhir lebih dari sepuluh tahun sebelum adanya TRCK, maka penggunaan asas retroaktif sangat terlihat dalam TRCK. Kemudian, pembentukan TRCK adalah jauh setelah terjadinya pelanggaran HAM pada rezim sebelumnya, dan kondisi politik dan demokrasi Korea Selatan pada saat TRCK terbentuk adalah dalam kondisi yang mapan atau terkonsolidasi.

Kanada membentuk TRCC pada tahun 2008 setelah masyarakat suku asli yang tergabung dalam *First Nation* meminta pemerintah untuk menindaklanjuti laporan dari *Royal Commission on Aboriginal Peoples* yang merekomendasikan untuk dilakukan rekonsiliasi nasional antara orang-orang Aborigin dengan non-Aborigin di Kanada.<sup>21</sup> Pemerintah Kanada mengeluarkan *Indian Act 1920* yang mengatur mengenai asimilasi bagi anak-anak Suku Indian yang berusia 4 hingga 18 tahun untuk wajib mengikuti sekolah yang dibentuk pemerintah (*residential school*), serta larangan bagi orang tua untuk melarang atau menarik anak-anak mereka dari kewajiban sekolah tersebut.<sup>22</sup> Sekolah pemukiman yang awalnya bertujuan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak suku asli melalui pendidikan, tetapi ternyata telah menghancurkan budaya dan komunitas suku asli serta tidak menjamin adanya peningkatan kemampuan bagi orang-orang suku asli.<sup>23</sup> TRCC dibentuk bukan dalam transisi suatu rezim, bahkan fokus kinerjanya adalah pelanggaran HAM berat yang dialami oleh masyarakat suku asli Kanada dan

terjadi bertahun-tahun yang lalu.<sup>24</sup>

Salah satu karakter dari komisi kebenaran dalam era nontransisional adalah dibentuk oleh negara demokrasi. Berdasarkan indeks demokrasi yang diterbitkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (selanjutnya disebut “EIU”), pada nilai indeks demokrasi Korea Selatan pada tahun 2006 adalah 78,8 dan 81,1 pada tahun 2010 saat berakhirnya komisi, sedangkan indeks demokrasi Kanada pada tahun 2008 adalah 90,7 dan 90,8 pada saat berakhirnya komisi tahun 2015.<sup>25</sup> Artinya, berdasarkan klasifikasi demokrasi oleh EIU, Korea Selatan dan Kanada termasuk dalam kategori negara demokrasi pada saat pembentukan KKR, meskipun indeks demokrasi Korea Selatan pada saat pembentukan KKR tidak termasuk dalam *full democracy*.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah “Bagaimanakah praktik Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam era nontransisional di Korea Selatan dan Kanada?” Pembahasan akan difokuskan mengenai perbedaan dan persamaan TRCC dan TRCK dalam pemberian mandat bagi komisi, keanggotaan dalam komisi yang juga mencakup struktur komisi, perlindungan hukum terhadap komisioner, pemberi kesaksian dan terduga pelaku, hal-hal yang dilakukan dalam mengungkapkan kebenaran, serta tindak lanjut oleh negara pasca berakhirnya komisi. Artikel ini juga bertujuan sebagai bahan kajian perbandingan hukum bagi Indonesia dalam menyusun Rancangan Undang-Undang mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

---

20 *Law of the Framework Act Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation* (Republic of Korea, 2005), Article 2, par.1.

21 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Canada's Residential Schools: Reconciliation, The Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, vol. 6 (Winnipeg, 2015), 3.

22 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, 4.

23 Amanda Gebhard, “Reconciliation or Racialization? Contemporary Discourses about Residential Schools in the Canadian Prairies,” *Canadian Journal of Education* 40, no. 1 (2017): 4.

---

24 Cynthia E. Milton and Anne Marie Reynaud, “Archives, Museums and Sacred Storage: Dealing with the Afterlife of the Truth and Reconciliation Commission of Canada,” *International Journal of Transitional Justice* 13, no. 3 (2019): 527.

25 The Economist Intelligence Unit, “EIU-Democracy Indices Dataset,” *Gapminder*, last modified 2021, accessed August 6, 2022, [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-2qkxth\\_h4jL\\_\\_-VjMVIAY8XLSXursWeGqE1r-IHQ/edit#gid=176703676](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-2qkxth_h4jL__-VjMVIAY8XLSXursWeGqE1r-IHQ/edit#gid=176703676).

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian perbandingan, yakni melalui membandingkan dasar hukum, kewenangan, tugas dan fungsi, serta praktik Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Korea Selatan dan Kanada. Selanjutnya, penulis akan membandingkan persamaan dan perbedaan praktik tersebut.<sup>26</sup> Klasifikasi perbandingan yang dilakukan adalah mengenai hal-hal yang mendasari pembentukan komisi, struktur komisi serta keanggotaan dan staf dalam komisi, perlindungan bagi komisioner, staf, pemberi kesaksian, dan terduga pelaku, kewajiban, larangan dan sanksi bagi warga negara untuk mendukung kinerja komisi, hal-hal yang dilakukan oleh komisi untuk mengungkapkan kebenaran peristiwa di masa lalu, serta upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh komisi.

Bahan-bahan dalam artikel ini diperoleh dari laporan antara TRCK dan laporan akhir TRCC, buku, jurnal, dan berita yang membahas mengenai TRCK dan TRCC. TRCK hanya menerbitkan laporan dalam Bahasa Korea sejumlah empat volume dan tidak menerbitkan laporan akhir dalam Bahasa Inggris, sehingga digunakan literatur pendukung lainnya untuk menjelaskan praktik dari TRCK. Seluruh bahan tersebut akan dielaborasi sehingga akan terlihat keterkaitan antara TRCK dan TRCC.

## PEMBAHASAN

### A. Pemberian Mandat Komisi

Korea Selatan termasuk negara yang sering membentuk komisi kebenaran. Pada periode tahun 1999 hingga 2005, Korea Selatan telah membentuk tiga komisi kebenaran, yakni *The Jeju Commission* berdasarkan *Jeju 4.3 Special Act* Tahun 1999, *The Presidential Truth Commission on Suspicious Death* berdasarkan *Special Act on the Investigation of Suspicious Death* Tahun 2000, dan *Truth and Reconciliation Commission, Republic of Korea* berdasarkan *Law of the Framework Act Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*

Tahun 2005 (selanjutnya disebut "*Framework Act for Truth and Reconciliation*"). TRCK dibentuk dengan mandat yang lebih komprehensif dibandingkan komisi kebenaran yang telah dibentuk sebelumnya.<sup>27</sup> Dalam *Framework Act for Truth and Reconciliation*, TRCK diberikan mandat untuk menyelidiki peristiwa yang berkaitan dengan pendudukan Jepang pada tahun 1910, pembunuhan massal yang terjadi sejak tanggal 15 Agustus 1945 hingga Perang Korea 1952, kematian, kekerasan, penghilangan, teror, dan berbagai pelanggaran HAM termasuk diantaranya peradilan palsu yang terjadi sejak 15 Agustus 1945 hingga berakhirnya rezim otoriter, kejadian lain yang dianggap sebagai peristiwa penting oleh TRCK, serta kasus-kasus yang tidak cukup diselidiki oleh *The Presidential Truth Commission on Suspicious Deaths* karena kurangnya waktu penyelidikan pada saat itu.<sup>28</sup>

Di Kanada, sejak adanya perubahan peraturan pada tahun 1990an yang memberikan kesempatan kepada para Penyintas untuk melakukan gugatan kelas (*class action*) ke pengadilan sehubungan dengan penerapan sekolah pemukiman, menyebabkan semakin banyaknya gugatan pengadilan mengenai hal ini. Pada tahun 2005, Pemerintah Federal Kanada mengadakan negosiasi untuk menyelesaikan meningkatnya gugatan pengadilan.<sup>29</sup> Negosiasi ini berujung pada revisi *The Indian Residential Schools Settlement Agreement* (selanjutnya disebut "*IRSSA*") pada 23 Mei 2006,<sup>30</sup> yang kemudian disetujui oleh sembilan Pengadilan Tinggi di Kanada pada 22 Maret 2007.<sup>31</sup> Revisi IRSSA

26 Peter Cruz, *Comparative Law in A Changing World*, Kedua. (London: Cavendish Publishing, 1999), 7.

27 Kim, "Trial and Error in Transitional Justice: Learning from South Korea's Truth Commissions," 151.

28 *Law of the Framework Act Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*, Addenda, Article 3.

29 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Canada's Residential Schools: The History, Part 2, 1939 to 2000, The Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, vol. 2 (Winnipeg, 2015), 552.

30 Assembly of First Nations et al., *Indian Residential Schools Settlement Agreement* (Canada, 2006), Article 7, par.1.

31 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Canada's Residential Schools: The History, Part 2, 1939 to 2000*, 2:575.

mengatur lima hal pokok, yakni pembiayaan komunal, pendampingan mandiri, dukungan untuk Aboriginal Health Foundation, sekolah pemukiman, dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.<sup>32</sup>

Pembentukan TRCC pada 1 Juni 2008 adalah didasarkan pada Schedule “N” IRSSA tentang Mandat Bagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya disebut “**Schedule N**”). Dalam Schedule N, tujuan dibentuknya TRCC adalah (1) untuk menarasikan pelaksanaan, dampak, dan konsekuensi dari sekolah pemukiman, (2) menyediakan pengaturan holistik sesuai dengan budaya dan aman bagi mantan pelajar, keluarganya, dan komunitas saat mereka memberikan kesaksian kepada Komisi, (3) mendukung, mempromosikan, dan memfasilitasi kerja-kerja pencarian kebenaran dan rekonsiliasi pada tingkat nasional dan masyarakat, (4) mempromosikan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Kanada tentang sekolah pemukiman dan dampaknya, (5) menyusun rekaman sejarah yang dapat diakses oleh masyarakat, (6) menyusun laporan kepada Pihak Perjanjian (IRSSA) dan rekomendasi kepada Pemerintah Kanada, serta (7) menyelenggarakan peringatan bagi mantan pelajar sekolah pemukiman dan keluarganya sebagaimana diatur dalam Schedule “X” IRSSA.<sup>33</sup>

TRCK dan TRCC menyelidiki peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dalam periode peristiwa yang panjang, yakni sejak tahun 1910 hingga 1993 (TRCK) dan sejak era kolonialisme hingga tahun 1998 (TRCC). Keduanya menyelidiki peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi selama lebih dari delapan puluh tahun). Menurut Jeremy Sarkin, periode penyelidikan peristiwa yang sangat panjang memiliki manfaat dan tantangan bagi komisi. Manfaat yang diperoleh

adalah akan tersedianya narasi yang utuh dalam memahami warisan atas konflik di masa lalu, sedangkan tantangan bagi komisi adalah dengan luasnya jangka waktu peristiwa pelanggaran HAM berat akan mempengaruhi kinerja komisi yang seringkali diberi jangka waktu untuk beroperasi selama dua hingga lima tahun.<sup>34</sup> TRCK harus dapat menyelesaikan mandatnya selama empat tahun dua bulan (2005 – 2010), sedangkan TRCC menyelesaikan mandatnya selama tujuh tahun (2008 – 2015). TRCC memperpanjang periode operasinya selama satu tahun hingga tahun 2015 karena melonjaknya korban dan keluarga korban yang dicatat keterangannya.<sup>35</sup>

## B. Struktur dalam Komisi

TRCK terdiri dari seorang Ketua, tiga orang *Standing Committee*, dan sebelas orang komisioner. Keanggotaan TRCK terdiri dari 15 orang komisioner yang 8 orang diantaranya dipilih oleh *National Assembly* (parlemen), 4 orang dipilih oleh presiden, dan 3 orang dipilih oleh ketua hakim Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan komisioner adalah dua tahun dan dapat diperpanjang. Terdapat beberapa syarat untuk dapat dipilih menjadi komisioner TRCK, antara lain (1) menjadi professor tetap selama lebih dari sepuluh tahun di universitas terakreditasi, (2) hakim, jaksa, hakim militer atau pengacara dengan pengalaman lebih dari sepuluh tahun, (3) pejabat publik tingkat III minimal sepuluh tahun, dan (4) peneliti sejarah atau arsiparis dokumen sejarah selama sepuluh tahun atau lebih.<sup>36</sup> Selain juga terdapat beberapa orang yang didiskualifikasi untuk menjadi komisioner TRCK, antara lain (1) bukan warga negara Korea Selatan, (2) orang-orang yang disebutkan dalam *Article 33 State*

---

32 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, 130.

33 Assembly of First Nations et al., *Schedule “N” of The Indian Residential Schools Settlement Agreement: Mandate for The Truth and Reconciliation* (Canada, 2006), Article 1.

34 Sarkin, “Redesigning the Definition a Truth Commission , but Also Designing a Forward-Looking Non-Precriptive Definition to Make Them Potentially More Successful,” 358.

35 Claudia Gualtieri, “The Release of the Truth and Reconciliation Commission Findings on Indian Residential Schools in Canada,” in *Utopian Discourses Across Cultures*, ed. Miriam Bait, Marina Brambilla, and Valentina Crestani (Peter Lang AG, 2015), 197.

36 *Law of the Framework Act Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*, Article 4, par.2.

*Public Officials Act*, (3) anggota partai politik, dan (4) terdaftar sebagai kandidat pada seluruh pemilihan umum.<sup>37</sup>

TRCK mempekerjakan 240 staf yang terbagi dalam beberapa departemen, seperti kantor sekretaris jenderal, tim urusan hukum dan audit, tim kebijakan dan hubungan masyarakat, biro manajemen administrasi, biro kemerdekaan nasional, biro pembantaian, dan biro pelanggaran HAM berat.<sup>38</sup> Staf tersebut berasal dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, pengacara, maupun jaksa. TRCK mengizinkan untuk melibatkan pegawai pemerintah pusat dalam kerja komisi, tetapi melarang untuk rangkap jabatan sebagai komisioner.<sup>39</sup> Beberapa pegawai pemerintah yang dapat dipekerjakan sebagai staf TRCK adalah berasal dari Kantor Koordinator Kebijakan Pemerintahan, Komite Kepegawaian Pusat, Kementerian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Unifikasi, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Pertahanan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tentara dan Veteran, Badan Intelijen, Kepolisian Nasional, dan Kementerian Keuangan.<sup>40</sup>

Berbeda dengan keanggotaan TRCK, TRCC hanya memiliki tiga orang komisioner, yakni seorang Ketua dan dua orang Komisioner, yang salah satu diantaranya harus merupakan orang suku asli atau menikah dengan suku asli, dan dipilih berdasarkan nominasi dari mantan pelajar sekolah pemukiman, organisasi suku asli, gereja, dan pemerintah.<sup>41</sup> Apabila komisioner TRCK Ahn Byung-Ook diganti karena dianggap bertanggung jawab atas penerbitan Laporan Antara *Truth*

*and Reconciliation Activities of the Past Three Years*,<sup>42</sup> maka ketiga komisioner TRCC diganti karena perbedaan interpretasi tugas komisioner dimana Ketua TRCC Hakim Harry LaForme mengundurkan diri pada Oktober 2008 dan Komisioner Claudette Dumont-Smith dan Jane Brewin Morley mengundurkan diri pada Januari 2009. Pasca pengunduran diri ketiga komisioner tersebut, para pihak dalam IRSSA memilih tiga orang komisioner baru yang aktif bekerja pada 1 Juli 2009. Ketiganya memiliki hubungan erat dengan sistem sekolah pemukiman seperti pernah menjadi korban atau memiliki kekerabatan yang erat dengan penyintas (orang tua atau suami).<sup>43</sup>

Struktur TRCC terdiri atas tiga orang Komisioner, *Commissioners' Spiritual Advisors* sebanyak empat orang, *Survivors Committee* sebanyak sepuluh orang, *Inuit Sub-Commission* sebanyak enam orang, *Special Advisor* sebanyak tiga orang, Regional Liaisons sebanyak tujuh orang, dan Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Executive Director. Terdapat 353 orang dan 64 entitas yang dipekerjakan atau bekerja sama dengan Sekretariat.<sup>44</sup> TRCC juga membentuk perwakilan di daerah seperti di Ottawa, Vancouver, Hobbema, dan Yellowknife, serta menempatkan enam orang penghubung regional di Québec dan Atlantic Canada, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, Yukon dan The Northwest Territories.<sup>45</sup> Perwakilan di daerah tidak ditemukan dalam TRCK. Untuk mendukung kerja TRCK, Pemerintah Korea Selatan mengatur agar Pemerintah Daerah dan perwakilan Korea Selatan di luar negeri (kedutaan dan konsul) menjadi

37 Ibid., Article 9, par.1.

38 Truth and Reconciliation Commission Republic of Korea, *Truth and Reconciliation: Activities of the Past Three Years* (Seoul, 2009), 18.

39 *Law of the Framework Act Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*, Article 10, par.1.

40 *Enforcement Decree on Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation* (Republic of Korea, 2007), 15.

41 Assembly of First Nations et al., *Schedule "N" of The Indian Residential Schools Settlement Agreement: Mandate for The Truth and Reconciliation*, Article 5.

42 Hun Joon Kim, "A Tale of Two Commissions: Explaining the Different Trajectories of Human Rights Movements in Korea," *Peacebuilding* 9, no. 2 (2021): 182.

43 David Bruce MacDonald, *The Sleeping Giant Awakens: Genocide, Indian Residential Schools, and the Challenge of Conciliation*, Ontario History (Toronto: University of Toronto Press, 2019), 115–117.

44 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, Appendix 6 Commission Staff and Contractors.

45 Ibid., 23–25.

kepanjangan tangan TRCK di daerah dan di luar negeri untuk menerima Petisi yang selanjutnya diteruskan oleh mereka ke TRCK.<sup>46</sup> Dengan kata lain, Korea Selatan tidak membentuk entitas baru seperti di Kanada.

Berbeda dengan TRCK, TRCC tidak memperkenankan untuk mempekerjakan secara langsung pegawai dari pemerintah federal.<sup>47</sup> Akibatnya, TRCC harus meminta izin pengadilan terlebih untuk mengakses beberapa dokumen pemerintahan atau lokasi-lokasi tertentu.<sup>48</sup> Hal ini juga dipersulit dengan tidak adanya kewenangan TRCC untuk memanggil orang-orang tertentu dalam rangka pengambilan keterangan.<sup>49</sup> Kondisi menyebabkan TRCC hanya mengandalkan kesaksian sukarela dari penyintas, saksi, ataupun pelaku.

Dalam hal pembiayaan komisi, TRCC dapat lebih independen daripada TRCK. Hal ini terlihat dari pembiayaan TRCC yang tidak menggunakan anggaran khusus dari pemerintah. Anggaran TRCC diambil dari Anggaran Pembiayaan Rutin untuk Suku Asli senilai \$60 juta dari anggaran senilai \$1,9 miliar.<sup>50</sup> Adapun anggaran TRCK berasal dari anggaran khusus Pemerintah Korea Selatan senilai hampir \$76 miliar.<sup>51</sup> Anggaran TRCK lebih besar karena juga membiayai biaya personel dan operasional kinerja.<sup>52</sup>

---

46 *Enforcement Decree on Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*, Article 3.

47 MacDonald, *The Sleeping Giant Awakens: Genocide, Indian Residential Schools, and the Challenge of Conciliation*, 118.

48 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, 255.

49 Assembly of First Nations et al., *Schedule "N" of The Indian Residential Schools Settlement Agreement: Mandate for The Truth and Reconciliation*, Article 2.

50 MacDonald, *The Sleeping Giant Awakens: Genocide, Indian Residential Schools, and the Challenge of Conciliation*, 118.

51 Hun Joon Kim, "Truth Commissions in South Korea: Lessons Learned," *Middle East-Asia Project*, last modified 2013, accessed August 8, 2022, <https://www.mei.edu/publications/truth-commissions-south-korea-lessons-learned>.

52 Truth and Reconciliation Commission Republic of Korea, *Truth and Reconciliation: Activities of the Past Three Years*, 15.

### C. Perlindungan dan Larangan Terhadap Komisioner, Pemberi Kesaksian, dan Terduga Pelaku

Korea Selatan dan Kanada mengatur mengenai perlindungan bagi komisioner, staf atau mereka yang bekerja sama dengan komisi, pemberi kesaksian, dan terduga pelaku. Hal-hal yang dilindungi selama operasional TRCK, antara lain (1) setiap orang dilarang untuk mengancam komisioner, staf, saksi mata, atau penilai termasuk melarang untuk mengintervensi tugas komisioner, staf, atau penilai dalam penyelidikan, (2) setiap orang tidak dapat mengalami kerugian seperti pemecatan, perumahan, pemotongan gaji, atau pemindahan, karena bekerja sama atau menyediakan informasi sehubungan dengan penyelidikan, (3) setiap orang tidak dapat disebut sebagai pelaku dalam koran, majalah, tayangan, maupun publikasi lainnya, karena jabatan dimasa lalu dalam pemerintahan, militer, pengadilan, atau organisasi yang sedang diselidiki, kecuali telah terbukti di pengadilan dan untuk kebaikan masyarakat, (4) setiap orang tidak dapat membuka hasil penyelidikan dalam koran, majalah, tayangan, maupun publikasi lainnya sebelum diterbitkannya Laporan Akhir Komisi, (5) tidak mengungkapkan nama-nama yang dianggap tidak menguntungkan seseorang selama proses penyelidikan,<sup>53</sup> dan (6) menunjuk institusi tertentu untuk melindungi orang-orang tertentu yang diketahui atau memberikan material untuk penyelidikan, dari ancaman fisik atau bahaya lainnya.<sup>54</sup>

Selain perlindungan diri, Korea Selatan juga mengatur beberapa larangan khususnya berkaitan dengan perlindungan atas privasi dan kehormatan seseorang, serta atas material atau dokumen tertentu dari kerusakan.<sup>55</sup> Pertama, setiap orang yang pernah menjadi komisioner, penasihat, staf, maupun pernah melakukan urusan untuk TRCK dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia

---

53 *Law of the Framework Act Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*, Article 30, 31, 35.

54 *Enforcement Decree on Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*, Article 11.

55 *Law of the Framework Act Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*, Article 41, 42, 43, 45, 47.

apapun dan menyalahgunakan informasi, material, dan barang-barang penyelidikan, dan apabila melanggar maka akan diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal sepuluh juta won. Kedua, setiap orang dilarang untuk menyamar sebagai komisioner atau staf TRCK untuk melakukan wewenang TRCK, dan apabila melanggar akan diancam pidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal sepuluh juta won. Ketiga, setiap orang selain TRCK dilarang untuk mengatasnamakan TRCK atau nama sejenis lainnya, dan jika melanggar akan didenda maksimal sepuluh juta won berdasarkan Keputusan Presiden. Keempat, setiap orang diancam pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda maksimal dua puluh juta won apabila mengajukan petisi palsu dengan maksud untuk merusak kehormatan orang lain atau mengetahui bahwa hal tersebut dapat menghalangi tugas komisioner, atau merusak kehormatan orang lain dengan menerbitkan material penyelidikan ke dalam koran, majalah, tayangan, atau publikasi lainnya.

Kelima, setiap orang diancam denda maksimal sepuluh juta won berdasarkan Keputusan Presiden apabila menyampaikan materi atau keterangan palsu dengan tujuan merugikan seseorang, atau menjawab pertanyaan dengan tidak benar, atau menolak untuk diselidiki, atau tidak mengikuti perintah pendampingan, atau memaksakan tindakan yang tidak menguntungkan kepada seseorang. Apabila seseorang tidak setuju atas Keputusan Presiden mengenai denda tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Ketua TRCK dalam waktu 14 hari setelah adanya pemberitahuan, dan selanjutnya akan diadakan persidangan atas keberatan tersebut. Namun, apabila tidak mengajukan keberatan tetapi juga tidak membayar denda, maka pembayaran denda akan dibebankan ke dalam pembayaran pajak nasional orang yang bersangkutan.

Kanada tidak mengatur perlindungan kepada komisioner maupun stafnya. Hal ini dikarenakan TRCC tidak memiliki kewenangan pemanggilan

para pihak. Namun, Kanada mengatur perlindungan hak privasi dan kerahasiaan bagi mereka yang berpartisipasi dalam pengambilan kesaksian oleh TRCC,<sup>56</sup> dan bagi orang-orang yang disebutkan namanya pada saat pengambilan pernyataan. Selain itu juga terdapat beberapa larangan bagi komisioner, antara lain tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan pemeriksaan formal dan bertindak sebagai penyidik publik atau melakukan proses hukum secara formal, tidak diperkenankan untuk melakukan pemanggilan atau pemaksaan kehadiran atau partisipasi pihak tertentu dalam aktivitas komisi, tidak diperkenankan untuk mengungkapkan pelanggaran atau tanggung jawab individu kecuali telah ditetapkan pengadilan, tidak diperkenankan untuk membuka pernyataan yang dibuat oleh individu kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan atau dengan alasan demi hukum, serta tidak diperkenankan untuk menyebutkan nama-nama tertentu dalam acara, pengambilan pernyataan publik maupun laporan dan rekomendasi tanpa persetujuan dari yang bersangkutan kecuali telah ditetapkan melalui proses hukum atau pengungkapan publik oleh yang bersangkutan.<sup>57</sup>

#### **D. Pengungkapan Kebenaran**

TRCK melakukan penyelidikan atas permintaan dari korban dan keluarga korban atau disebut berdasarkan Petisi. TRCK akan melakukan skrining atas petisi yang berisi nama, alamat, objek petisi, dan alasan memberikan petisi kepada komisi,<sup>58</sup> untuk selanjutnya dikeluarkan keputusan apakah TRCK menerima atau menolak petisi tersebut.<sup>59</sup> Apabila pada saat pemberitahuan penerimaan atau penolakan petisi, Pemberi Petisi telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan akan disampaikan kepada keturunan atau orang

---

56 Assembly of First Nations et al., *Schedule "N" of The Indian Residential Schools Settlement Agreement: Mandate for The Truth and Reconciliation*, Article 13.

57 Ibid., Article 2.

58 *Law of the Framework Act Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*, Article 20, par.1.

59 *Enforcement Decree on Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*, Article 5.

tuanya.<sup>60</sup> Beberapa komisioner dilarang untuk berpartisipasi dalam musyawarah keputusan dan penyusunan resolusi, apabila: (1) komisioner atau pasangannya pernah menjadi pelaku atau korban yang sedang diselidiki, (2) komisioner memiliki hubungan kekerabatan sedarah dengan pelaku atau korban dari peristiwa yang sedang diselidiki, (3) komisioner pernah terlibat dalam penyidikan pidana atau peradilan yang berhubungan dengan peristiwa yang sedang diselidiki, (4) komisioner pernah memberikan kesaksian atas peristiwa yang sedang diselidiki, dan (5) komisioner tergabung dalam pihak yang terkait dengan peristiwa yang sedang diselidiki.<sup>61</sup>

TRCK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan, seperti pembukaan makam orang-orang yang diduga menjadi korban pelanggaran HAM berat dengan mengacu pada *Funeral Services Act* dan persetujuan pemilik tanah. Pada tahun 2007 hingga tahun 2009, TRCK telah mengidentifikasi 154 lokasi dan telah membuka 13 lokasi di seluruh Korea Selatan. Hasilnya adalah ditemukan 1.617 korban Perang Korea yang jasad atau abunya disimpan sementara di museum universitas.<sup>62</sup>

TRCK juga diberi kewenangan untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak tertentu, dan pihak tersebut wajib untuk menyediakan material atau dokumen yang diminta oleh TRCK. Apabila mereka menolak, maka harus menjelaskan alasan penolakannya untuk selanjutnya diputuskan dalam Resolusi Komisi apakah alasan tersebut diterima atau tidak. Beberapa hal yang dikecualikan untuk diberikan kepada TRCK adalah jika berhubungan dengan keamanan negara terkait militer, diplomasi dan Korea Utara.<sup>63</sup>

TRCK menyimpulkan bahwa telah menerima 11,174 petisi, yang terdiri dari 290 kasus berkaitan

dengan gerakan kemerdekaan, 8.175 berhubungan dengan pembantaian warga, dan 2.709 berkaitan dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara ataupun musuh negara. Adapun hingga September 2010, TRCK telah menyelidiki seluruh petisi dengan menindak-lanjuti 8.468 kasus dan menolak 1.729 kasus.<sup>64</sup> TRCK juga mengkonfirmasi bawah 72% korban pembunuhan dilakukan oleh agen negara, 22% dilakukan oleh musuh Korea Selatan, dan 6% dilakukan oleh militer Amerika Serikat.<sup>65</sup>

Di Kanada, TRCC menyelenggarakan lebih dari 900 kegiatan,<sup>66</sup> yakni National Events, Regional Events dan Closing Events, dengan keterangan, dan kunjungan ke lebih dari 70 komunitas, yang menyita perhatian hampir 150.000 orang.<sup>67</sup> National Events dilakukan untuk mengikutsertakan keseluruhan warga Kanada melalui pemberian pernyataan khususnya mengenai dampak kebijakan sekolah pemukiman, selebrasi dan pesta budaya, serta pelibatan masyarakat luas.<sup>68</sup>

Berkaitan dengan analisis dokumen, Library and Archives Canada telah membuat tiga puluh peta jalan untuk mengkompilasi berbagai dokumen pemerintah yang menginformasikan mengenai sistem sekolah pemukiman.<sup>69</sup> Meski demikian, TRCC juga mengalami kendala dalam mengakses beberapa dokumen pemerintahan sehingga TRCC beberapa kali mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta petunjuk pengadilan sehubungan

---

60 *Law of the Framework Act Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*, Article 28.

61 *Ibid.*, Article 11, par.1.

62 Kim, "A Tale of Two Commissions: Explaining the Different Trajectories of Human Rights Movements in Korea," 178.

63 *Law of the Framework Act Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*, Article 23.

64 Kim, "Trial and Error in Transitional Justice: Learning from South Korea's Truth Commissions," 152.

65 Kim, "A Tale of Two Commissions: Explaining the Different Trajectories of Human Rights Movements in Korea," 178.

66 Ravi De Costa, "Discursive Institutions in Non-Transitional Societies: The Truth and Reconciliation Commission of Canada" (2017): 190.

67 MacDonald, *The Sleeping Giant Awakens: Genocide, Indian Residential Schools, and the Challenge of Conciliation*, 118.

68 Costa, "Discursive Institutions in Non-Transitional Societies: The Truth and Reconciliation Commission of Canada," 191.

69 MacDonald, *The Sleeping Giant Awakens: Genocide, Indian Residential Schools, and the Challenge of Conciliation*, 122.

dengan akses atas dokumen pemerintahan.<sup>70</sup>

Dalam kurun waktu 2008 – 2013, TRCC telah menerima 6.750 pernyataan dari Penyintas, keluarga korban, dan individu terkait melalui pengambilan pernyataan secara terbuka ataupun tertutup ditingka lokal dan nasional, serta melalui *streaming*.<sup>71</sup> Sebanyak 11.132 anak-anak dipindahkan dari keluarganya aslinya untuk ditempatkan di sekolah pemukiman atau menjadi anak asuh non suku asli sepanjang tahun 1960 hingga 1990.<sup>72</sup>

### E. Rekonsiliasi oleh Komisi

Hal pertama yang biasa dilakukan dalam rekonsiliasi adalah permintaan maaf secara resmi oleh negara. Presiden Roh Moo-hyun selama masa pemerintahannya telah melakukan tiga kali permintaan maaf sebagai kepala negara, yakni pada tahun 2003 atas Peristiwa di Jeju 3 April 1948 hingga 13 Mei 1949, pada tahun 2006 saat TRCK menggelar *memorial service*, dan pada tahun 2008 di Ulsan yang ditujukan kepada korban Perang Korea yang ditangkap atau dibunuh oleh pemerintah Korea Selatan saat itu.<sup>73</sup> Perdana Menteri Stephen Harper melakukan permintaan maaf seminggu setelah dibentuknya TRCC atau tanggal 11 Juni 2008. Harper meminta maaf kepada masyarakat suku asli atas program asimilasi melalui sistem sekolah pemukiman (*residential school system*) di Kanada, namun Harper tidak mengakui hal tersebut sebagai genosida melainkan “pemindahan secara paksa”.<sup>74</sup> Selanjutnya, setiap tanggal 11 Juni diperingati

sebagai “*Day of the Apology*” di Kanada.<sup>75</sup> Selain dilakukan oleh Kepala Negara, permintaan maaf juga dilakukan oleh entitas lainnya, seperti perwakilan dari kepolisian dan militer di Korea Selatan<sup>76</sup> dan perwakilan partai politik dan gereja di Kanada.<sup>77</sup>

TRCK dapat merekomendasikan untuk mengampuni atau membebaskan seseorang yang dihukum akibat adanya fakta yang kabur (*obstructed facts*) maupun pengalihan hukuman atau peringanan hukuman apabila terdapat pengakuan yang dilakukan sebelum berakhirnya TRCK.<sup>78</sup> Rekomendasi untuk mengampuni atau mengurangi atau mengalihkan hukuman tidak dapat dilakukan oleh TRCC. Karena, TRCC tidak dapat ikut campur, mempengaruhi, atau membahayakan proses hukum apapun.<sup>79</sup>

Menurut Mahkamah Konstitusi Kanada, rekonsiliasi adalah kewajiban untuk memperbaiki sistem hukum bagi orang-orang Kanada dan orang-orang suku asli. Mahkamah melihat rekonsiliasi sebagai proses terus menerus bagi komunitas suku asli untuk mencapai kedaulatan atas hak-haknya sehingga tercapai tujuan masyarakat Kanada yang lebih luas.<sup>80</sup> Sedangkan menurut TRCC, rekonsiliasi adalah membangun dan memupuk rasa saling menghargai antara orang-orang Aborigin dengan non-Aborigin di Kanada,<sup>81</sup> dan

70 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, 27–28.

71 Wiebelhaus-Brahm, “Truth Commissions in Non-Transitional Contexts: Implications for Their Impact and Legacy,” 265.

72 MacDonald, *The Sleeping Giant Awakens: Genocide, Indian Residential Schools, and the Challenge of Conciliation*, 97.

73 Kim, “A Tale of Two Commissions: Explaining the Different Trajectories of Human Rights Movements in Korea,” 178.

74 Gualtieri, “The Release of the Truth and Reconciliation Commission Findings on Indian Residential Schools in Canada,” 200.

75 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, 211.

76 Kim, “A Tale of Two Commissions: Explaining the Different Trajectories of Human Rights Movements in Korea,” 178.

77 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Canada’s Residential Schools: Reconciliation*, 6:96–102.

78 *Law of the Framework Act Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*, Article 37, 46.

79 Assembly of First Nations et al., *Schedule “N” of The Indian Residential Schools Settlement Agreement: Mandate for The Truth and Reconciliation*, Article 2 (k).

80 Kim Stanton, “Reconciling Reconciliation: Differing Conceptions of the Supreme Court of Canada and the Canadian Truth and Reconciliation Commission,” *Journal of Law and Social Policy* 26, no. 1 (2017): 29.

81 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Canada’s Residential Schools: Reconciliation*, 6:3.

dilakukan terus menerus hingga antar generasi di Kanada.<sup>82</sup>

Sebelum adanya TRCC, masyarakat suku asli Kanada sering melakukan *class action* untuk meminta kompensasi kepada gereja dan pemerintah federal. Hingga awal tahun 2005, setidaknya 13.400 orang melakukan gugatan ke pengadilan dan *class action* yang mewakili 90.000 Penyintas untuk meminta kompensasi senilai \$12 miliar.<sup>83</sup> Selanjutnya, TRCC juga telah menyelenggarakan 75 kegiatan komunitas untuk mempromosikan penyembuhan dan rekonsiliasi, mengalokasikan anggaran dalam rangka peringatan, dan membentuk pusat studi nasional yang menyimpan seluruh bahan dan dokumen berkaitan dengan kerja TRCC. Pemerintah Kanada juga mendukung upaya rekonsiliasi melalui peringatan yakni dengan membuat dan menempatkan miniatur bangunan sekolah pemukiman dari kaca di Centre Block of Parliament Hill.<sup>84</sup>

Kanada melakukan pembaharuan kurikulum sebagai bagian dari rekonsiliasi. Pada Juli 2014, perwakilan dari Kementerian Pendidikan menyampaikan status perkembangan perubahan kurikulum di seluruh negara bagian. Kurikulum yang dimaksud antara lain mewajibkan informasi mengenai sekolah pemukiman untuk pelajar sekolah menengah atas, termasuk pelatihan bagi guru dan dialog langsung dengan para penyintas.<sup>85</sup>

## KESIMPULAN

Pembentukan KKR dalam era nontransisional di Korea Selatan dan Kanada terjadi tidak dengan serta merta. TRCK dibentuk setelah didahului dengan pembentukan berbagai komisi kebenaran,

dan TRCC dibentuk setelah adanya perjanjian yang melindungi hak-hak masyarakat asli dan berbagai pembiayaan oleh negara bagi masyarakat asli. TRCK dan TRCC dapat disebut sebagai upaya negara menyempurnakan berbagai upaya terdahulu dalam menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Perbedaan jumlah komisioner dalam TRCK dan TRCC tidak memberikan dampak yang signifikan dalam kinerja komisi, karena yang terpenting adalah jumlah mereka yang turun langsung ke lapangan untuk mengambil pernyataan ataupun melakukan penyeldikan di lokasi. Staf dalam TRCK dan TRCC berjumlah lebih dari 200 orang untuk masa kerja selama 5 tahun. Selain jumlah staf, latar belakang pendidikan dan pekerjaan staf juga berpengaruh. TRCK merekrut pejabat pemerintahan pada level tertentu sehingga mempermudah pemeriksaan pada entitas tertentu, sedangkan TRCC lebih banyak mempekerjakan staf yang berasal dari masyarakat asli dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian dan sejarah.

Norma mengenai perlindungan, larangan, dan sanksi dalam peraturan KKR di Korea Selatan dan Kanada sangat baik dalam perlindungan bagi komisioner dan staf, pemberi kesaksian, maupun mereka yang tersebutkan namanya dalam kesaksian sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Pengaturan mengenai penyimpanan dokumen KKR untuk menjaga kerahasiaan dan larangan bagi orang diluar KKR untuk mengaku sebagai bagian KKR juga penting untuk diatur. Sanksi berupa pidana seperti penjara dapat diberikan melalui kerja sama dengan aparat hukum, sedangkan sanksi berupa denda dapat diberikan melalui Keputusan Presiden yang apabila tidak dibayar maka dapat dibebankan kepada tagihan pajaknya.

Perbedaan komisi kebenaran dan KKR adalah mengenai proses rekonsiliasi. Dalam KKR, proses rekonsiliasi telah dilakukan oleh KKR. Periode pengumpulan fakta oleh TRCK dan TRCC rata-rata adalah 2 tahun, dan setelahnya dilanjutkan dengan proses rekonsiliasi, seperti penemuan

---

82 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, 209.

83 David Bruce MacDonald, "Canada's Truth and Reconciliation Commission: Assessing Context, Process, and Critiques," *Griffith Law Review* 29, no. 1 (2020): 154.

84 Truth and Reconciliation Commission of Canada, *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, 33–34.

85 Ibid., 236–237.

kembali mereka yang telah hilang, melakukan berbagai acara peringatan, membangun museum, termasuk rehabilitasi nama baik bagi korban dan peringanan hukuman bagi mereka yang telah secara sukarela mengakui perbuatannya dalam pemberian pernyataan.

## SARAN

Praktik Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Korea Selatan dan Kanada baik untuk diadopsi oleh Indonesia yang saat ini sedang menyiapkan rancangan naskah akademik mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Hal ini dikarenakan peristiwa yang dapat diselidiki oleh KKR di Indonesia adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Artinya, Indonesia hanya dapat menyelidiki peristiwa yang terjadi 22 tahun yang lalu. Kondisi ini mirip dengan TRCK yang menyelidiki peristiwa yang selesai 12 tahun yang lalu dan TRCC yang menyelidiki peristiwa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Beberapa hal yang dapat diadopsi adalah mengenai perlindungan bagi komisioner, staf, pemberi kesaksian, terduga pelaku, serta dokumen dan material, mekanisme pencarian kebenaran, larangan dan sanksi, serta metode rekonsiliasi oleh komisi. Namun demikian, adopsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Korea Selatan dan Kanada ini tetap harus memperhatikan kondisi sosial di masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang pernah menjadi korban, ataupun keluarga korban dan saksi dari pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan artikel ini, yakni segenap jajaran dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tim Editor Jurnal HAM,

serta Reviewers yang telah membantu dalam menyempurnakan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*. 5th ed. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2003.
- Assembly of First Nations, Inuit Representatives, Government of Canada, The General Synod of the Anglican Church of Canada, The Presbyterian Church of Canada, The United Church of Canada, Roman Catholic Entities, and Independent Counsel. *Indian Residential Schools Settlement Agreement*. Canada, 2006.
- Assembly of First Nations, Inuit Representatives, Government of Canada, The General Synod of the Anglican Church of Canada, The Presbyterian Church of Canada, The United Church of Canada, Roman Catholic Entities, and Independent Counsel. *Schedule "N" of The Indian Residential Schools Settlement Agreement: Mandate for The Truth and Reconciliation*. Canada, 2006.
- Bakiner, Onur. *Truth Commissions: Memory, Power, and Legitimacy*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2016.
- Costa, Ravi De. "Discursive Institutions in Non-Transitional Societies: The Truth and Reconciliation Commission of Canada" (2017).
- Cruz, Peter. *Comparative Law in A Changing World*. Kedua. London: Cavendish Publishing, 1999.
- Everett L. Worthington, Jr, and Jamie D. Aten. "Forgiveness and Reconciliation in Social Reconstruction After Trauma." In *Trauma Rehabilitation After War and Conflict*, edited by Erin Martz. 1st ed. New York: Springer, 2010.
- Freeman, Mark. *Truth Commissions and Procedural Fairness*. Pertama. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Gebhard, Amanda. "Reconciliation or Racialization? Contemporary Discourses about Residential Schools in the Canadian

- Prairies.” *Canadian Journal of Education* 40, no. 1 (2017): 1–30.
- Gualtieri, Claudia. “The Release of the Truth and Reconciliation Commission Findings on Indian Residential Schools in Canada.” In *Utopian Discourses Across Cultures*, edited by Miriam Bait, Marina Brambilla, and Valentina Crestani. Peter Lang AG, 2015.
- Hayner, Priscilla B. *Unspeakable Truths: Transitional Justice and The Challenge of Truth Commissions*. 2nd ed. New York: Routledge, 2011.
- Kim, Hun Joon. “A Tale of Two Commissions: Explaining the Different Trajectories of Human Rights Movements in Korea.” *Peacebuilding* 9, no. 2 (2021): 164–178.
- . “Trial and Error in Transitional Justice: Learning from South Korea’s Truth Commissions.” *Buffalo Human Rights Law Review* 19, no. 1 (2013): 125–168.
- . “Truth Commissions in South Korea: Lessons Learned.” *Middle East-Asia Project*. Last modified 2013. Accessed August 8, 2022. <https://www.mei.edu/publications/truth-commissions-south-korea-lessons-learned>.
- Kochanski, Adam. “Framing, Truth-Telling, and the Limits of Local Transitional Justice.” *Review of International Studies* 1 (2021): 1–18.
- . “Mandating Truth : Patterns and Trends in Truth Commission Design.” *Human Rights Review* 21 (2020): 113–137.
- Lawry-White, Merryl. “The Reparative Effect of Truth Seeking in Transitional Justice.” *International and Comparative Law Quarterly* 64, no. 1 (2015): 141–177.
- MacDonald, David Bruce. “Canada’s Truth and Reconciliation Commission: Assessing Context, Process, and Critiques.” *Griffith Law Review* 29, no. 1 (2020): 150–174.
- . *The Sleeping Giant Awakens: Genocide, Indian Residential Schools, and the Challenge of Conciliation*. Ontario History. Toronto: University of Toronto Press, 2019.
- Milton, Cynthia E., and Anne Marie Reynaud. “Archives, Museums and Sacred Storage: Dealing with the Afterlife of the Truth and Reconciliation Commission of Canada.” *International Journal of Transitional Justice* 13, no. 3 (2019): 524–545.
- Sarkin, Jeremy Julian. “Redesigning the Definition a Truth Commission , but Also Designing a Forward-Looking Non-Prescriptive Definition to Make Them Potentially More Successful.” *Human Rights Review* 19 (2018): 349–368.
- Sisson, Jonathan. “A Conceptual Framework for Dealing with the Past.” *Politorbis*, no. 50–3 (2010): 11–15.
- Stanton, Kim. “Reconciling Reconciliation: Differing Conceptions of the Supreme Court of Canada and the Canadian Truth and Reconciliation Commission.” *Journal of Law and Social Policy* 26, no. 1 (2017): 21–42.
- Teitel, Ruti G. *Transitional Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- The Economist Intelligence Unit. “EIU-Democracy Indices Dataset.” *Gapminder*. Last modified 2021. Accessed August 6, 2022. [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-2qkxth\\_h4jL\\_\\_-VjMVIAY8XLSXursWeGqE1r-IHQ/edit#gid=176703676](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z-2qkxth_h4jL__-VjMVIAY8XLSXursWeGqE1r-IHQ/edit#gid=176703676).
- Truth and Reconciliation Commission of Canada. *Canada’s Residential Schools: Reconciliation. The Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*. Vol. 6. Winnipeg, 2015.
- . *Canada’s Residential Schools: The History, Part 2, 1939 to 2000. The Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*. Vol. 2. Winnipeg, 2015.
- . *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*. Winnipeg, 2015.
- Truth and Reconciliation Commission Republic of Korea. *Truth and Reconciliation: Activities of the Past Three Years*. Seoul, 2009.
- Wiebelhaus-Brahm, Eric. “Truth Commissions in Non-Transitional Contexts: Implications for Their Impact and Legacy.” *The Global*

*Impact and Legacy of Truth Commissions*  
(2019): 247–268.

Winter, Stephen. *Transitional Justice in Established Democracies*. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014.

Zvobgo, Kelebogile. “Demanding Truth: The Global Transitional Justice Network and the Creation of Truth Commissions.” *International Studies Quarterly* 64, no. 3 (2020): 609–625.

*Enforcement Decree on Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*. Republic of Korea, 2007.

*Law of the Framework Act Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation*. Republic of Korea, 2005.

